



DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUKABUMI

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
No. 3574/G4/KL/2009 Tanggal 2009  
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional  
Menyatakan



SERTIFIKAT  
**NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

**20202361**

Diberikan Kepada :

**SMPN 2 SURADE**

JL. CIPEUNDEUY NO. 1  
CIPEUNDEUY, KEC. SURADE  
KAB. SUKABUMI, JAWA BARAT

Sukabumi, 20 September 2013

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sukabumi



Dr. H. Zafwan Muta'in, M.Si  
NIP. 19600201981001007

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1997/1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1997/1998;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah :
    - a. Nomor 27 Tahun 1990;
    - b. Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
    - c. Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
    - d. Nomor 72 Tahun 1991;
    - e. Nomor 39 Tahun 1992;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 44 Tahun 1974;

- b. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;
  - c. Nomor 61 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998;
  - d. Nomor 122/M Tahun 1998;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0295/O/1978;
  - b. Nomor 0296/O/1978;
  - c. Nomor 0248/U/1985;
  - d. Nomor 0486/U/1992;
  - e. Nomor 0487/U/1992;
  - f. Nomor 0490/U/1992;
  - g. Nomor 0491/U/1992;
  - h. Nomor 054/U/1993;
  - i. Nomor 060/U/1993;
  - j. Nomor 061/U/1993;
  - k. Nomor 080/U/1993;
  - l. Nomor 0125/U/1994;
  - m. Nomor 002/U/1995;
  - n. Nomor 034/O/1997;
  - o. Nomor 035/O/1997;
  - p. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 391/MK.WASPAN/12/1998 tanggal 31 Desember 1998.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1997/1998.

#### Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1997/1998.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

#### Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0295/O/1978;
  - b. Nomor 0296/O/1978;
  - c. Nomor 034/O/1997;
  - d. Nomor 035/O/1997;
  - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

#### Pasal 3

Memerugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.



Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. TK Negeri 212 buah;
2. SLB Negeri 37 buah;
3. SLTP Negeri 10.375 buah;
4. SMU Negeri 2.795 buah;
5. SMK Negeri 762 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Januari 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : ...

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan,
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan,  
Kepala Sub Bagian Penggandaan  
Peraturan Perundang-undangan.



Putut Pujogiri, S.H.  
NIP 131661278

1	2	3	4	5	6	7
		37. SLTP Negeri 3 Wanayasa	-	Wanayasa	Kabupaten Purwakarta	
		38. SLTP Negeri 3 Darangdan	-	Darangdan	Kabupaten Purwakarta	
		39. SLTP Negeri 4 Campaka	-	Campaka	Kabupaten Purwakarta	
		40. SLTP Negeri 8 Cilegon	-	Cibeber	Kota Administratif Cilegon Kabupaten Serang	
		41. SLTP Negeri 2 Cikeusal	-	Cikeusal	Kabupaten Serang	
		42. SLTP Negeri 2 Carenang	-	Carenang	Kabupaten Serang	
		43. SLTP Negeri 2 Walantaka	-	Walantaka	Kabupaten Serang	
		44. SLTP Negeri 2 Baros	-	Baros	Kabupaten Serang	
		45. SLTP Negeri 3 Surade	-	Surade	Kabupaten Sukabumi	
		46. SLTP Negeri 3 Warung Klara	-	Warung Klara	Kabupaten Sukabumi	
		47. SLTP Negeri 3 Ciracap	-	Ciracap	Kabupaten Sukabumi	
		48. SLTP Negeri 4 Pelabuhan Ratu	-	Pelabuhan Ratu	Kabupaten Sukabumi	
		49. SLTP Negeri 2 Cikidang	-	Cikidang	Kabupaten Sukabumi	

1	2	3	4	5	6	7
27.	TIMOR TIMUR					
A.	PEMBUKAAN	1. TK Negeri Suai	-	Suai	Kabupaten Covalima	11.1.1.4236.23.01.27.5110 11.1.1.4236.23.01.27.5120 11.1.1.4236.23.01.27.5150 11.1.1.4236.23.01.27.5210 11.1.1.4236.23.01.27.5220 11.1.1.4236.23.01.27.5230 11.1.1.4236.23.01.27.5250 11.1.1.4236.23.01.27.5350
		2. SLTP Negeri 7 Dili	-	Dili Barat	Kota Administratif Dili Kabupaten Dili	11.1.1.4242.23.01.27.5110 11.1.1.4242.23.01.27.5120 11.1.1.4242.23.01.27.5150 11.1.1.4242.23.01.27.5210
		3. SLTP Negeri 3 Lospalos	-	Lospalos	Kabupaten Lautem	11.1.1.4242.23.01.27.5220 11.1.1.4242.23.01.27.5230 11.1.1.4242.23.01.27.5250 11.1.1.4242.23.01.27.5350

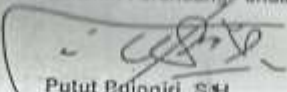
72

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  
A.n. Kepala Bagian Penyelusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan,  
Kepala Sub Bagian Penggandaan  
Peraturan Perundang-undangan

  
Putut Djojogiri, S.H.  
NIP. 131661278